



# **BUPATI LIMA PULUH KOTA**

**PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA**

**NOMOR 900.1.3.5/28 /BUP-LK/I/2026**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta kelancaran tugas sehingga terwujudnya Pengelolaan Administrasi Keuangan yang baik dipandang perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah



(Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KESATU : Menunjuk Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.

KEDUA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran Perangkat Daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. Mempertanggungjawabkan penggunaan Uang Persediaan (UP) Ganti Uang (GU), Tambahan Uang (TU) persediaan kepada Kepala Perangkat Daerah melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; dan
- c. Bendaharawan Pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan wajib pungut pajak lainnya serta wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara pada Bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Bank Persepsi atau Pos Giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak  
pada tanggal 2 Januari 2026

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

**SAFNI**



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
 NOMOR : 900.1.3.5/ 28 /BUP-LK/1/2026  
 TANGGAL : 2 JANUARI 2026  
 TENTANG : PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

| NO | NAMA / NIP                                              | OPD                                                                                                       | REKENING BANK     | NPWP                 |
|----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1  | RIDHO ILAHI, S.Pd<br>NIP. 19821103 201408 1 002         | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN                                                                           | 0100.0101.00320.5 | 00.287.277.8.204.000 |
| 2  | FETRI HELNITA, S.A.P<br>NIP. 19820220 200901 2 005      | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH<br>dr. ACHMAD DARWIS                                                              | 0100.0101.00161.1 | 00.121.081.4.204.000 |
| 3  | WIDYA HANDAYANI, SKM<br>NIP. 19890119 201101 2 001      | DINAS KESEHATAN                                                                                           | 0100.0101.00028.9 | 00.287.264.6.204.000 |
| 4  | HARBI AFZA, SE<br>NIP. 19830301 200604 1 007            | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN<br>PENATAAN RUANG                                                                | 0100.0101.00322.9 | 00.121.082.2.204.000 |
| 5  | YUNIARTI, A.Md<br>NIP. 19940623 202012 2 011            | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN<br>PENYELAMATAN                                                               | 0100.0101.00321.7 | 00.121.080.6.204.000 |
| 6  | CERIA HATIMI<br>NIP. 19880212 202203 2 001              | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                                                                                | 0100.0101.00050.2 | 95.434.647.4-204.000 |
| 7  | YUDI YORANDI, A.Md<br>NIP. 19861022 201101 1 001        | DINAS SOSIAL                                                                                              | 0100.0101.00323.1 | 00.287.281.0.204.000 |
| 8  | NANDA SAPUTRA, ST<br>NIP. 19951211 202012 1 006         | DINAS PERINDUSTRIAN DAN<br>TENAGA KERJA                                                                   | 0100.0101.00324.2 | 00.121.083.0.204.000 |
| 9  | RININTA MIA APRILIA, A.Md<br>NIP. 19850421 201001 2 020 | DINAS PANGAN                                                                                              | 0100.0101.00325.4 | 00.287.295.0.204.000 |
| 10 | FAISAL ISMET, ST<br>NIP. 198605012005011001             | DINAS LINGKUNGAN HIDUP,<br>PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN                                                | 0100.0101.00326.6 | 00.121.084.8.204.000 |
| 11 | JEVI ADE CHANDRA<br>NIP. 198404052010011004             | DINAS KEPENDUDUKAN DAN<br>PENCATATAN SIPIL                                                                | 0100.0101.00184.0 | 00.509.833.0.204.000 |
| 12 | LIDYA, S.Ak<br>NIP. 19791027 200701 2 001               | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT<br>DAN DESA/NAGARI                                                          | 0100.0101.00327.8 | 95.387.788.3.204.000 |
| 13 | LIRA MAYANTI, SH<br>NIP. 19810309 201408 2 002          | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK<br>DAN KELUARGA BERENCANA,<br>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN ANAK | 0100.0101.00328.1 | 00.287.297.6.204.000 |



| NO | NAMA / NIP                                               | OPD                                                                     | REKENING BANK     | NPWP                 |
|----|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 14 | NOFRIYAN EMRIL, A.Md. LLAJ<br>NIP. 19961112 201902 1 001 | DINAS PERHUBUNGAN                                                       | 0100.0101.00329.0 | 00.121.085.5.204.000 |
| 15 | LIDYA IMELDA, S.Kom<br>NIP. 19851019 201902 2 001        | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                        | 0100.0101.00330.8 | 00.287.2984.204.000  |
| 16 | RIDHO ILLAHI, SE<br>NIP. 19900315 202003 1 003           | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,<br>USAHA KECIL MENENGAH                    | 0100.0101.00331.1 | 00.121.086.3.204.000 |
| 17 | FANY FIOLA, SH<br>NIP. 19970618 202012 2 005             | DINAS PENANAMAN MODAL DAN<br>PELAYANAN TERPADU SATU PINTU               | 0100.0101.00178.6 | 00.287.300.8.204.000 |
| 18 | LIA ENJELINA, A.Md<br>NIP. 19850129 201001 2 009         | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN<br>OLAH RAGA                               | 0100.0101.00332.0 | 00.121.087.1.204.000 |
| 19 | PONI PUTRA<br>NIP. 19840516 200701 1 001                 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN                                        | 0100.0101.00333.3 | 00.287.313.1.204.000 |
| 20 | HILDAYATI, A.Md<br>NIP. 19760408 201001 2 005            | DINAS PERIKANAN                                                         | 0100.0101.00181.6 | 00.121.088.9-204.000 |
| 21 | RIRI ANGGRAINI, SE<br>NIP. 19790114 201101 2 002         | DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA<br>DAN PERKEBUNAN                     | 0100.0101.00022.8 | 00.287.417.0.204.000 |
| 22 | DONAL PUTRA, A.Md<br>NIP. 19870810 201001 1 005          | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN<br>HEWAN                                 | 0100.0101.00018.6 | 96.352.398.0-204.000 |
| 23 | JAMARIS<br>NIP. 19810101 200701 1 009                    | SEKRETARIAT DAERAH                                                      | 0100.0101.00032.1 | 00.121.283.6.204.000 |
| 24 | RIKI RIZALDI, SH<br>NIP. 19840403 201001 1 005           | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN<br>RAKYAT DAERAH                           | 0100.0101.00157.9 | 95.435.103.7.204.000 |
| 25 | RANDI WINATA, S.Si, M.Si<br>NIP. 19920504 202203 1 005   | BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN<br>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN<br>DAERAH | 0100.0101.00334.5 | 00.121.281.0.204.000 |
| 26 | BAYU ESA PUTRA<br>NIP. 19841017 201408 1 002             | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN<br>PENDAPATAN DAERAH                     | 0100.0101.00335.7 | 00.287.418.8.204.000 |
| 27 | SUARDI, S.Sos<br>NIP. 19791129 201001 1 002              | BADAN KEPEGAWAIAN DAN<br>PENGEMBANGAN SUMBER DAYA<br>MANUSIA            | 0100.0101.00336.9 | 00.287.419.6.204.000 |
| 28 | SILFIA ANGGRAINI,SH<br>NIP. 19840625 200901 2 010        | INSPEKTORAT DAERAH                                                      | 0100.0101.00020.4 | 00.121.282.8.204.000 |
| 29 | WELLA SEPTIANI, A.Md<br>NIP. 19960915 202012 2 010       | KECAMATAN GUNUANG OMEH                                                  | 0100.0101.00146.4 | 00.121.284.4.204.000 |
| 30 | DEVI MAULINA<br>NIP. 19831214 200906 2 001               | KECAMATAN BUKIK BARISAN                                                 | 0100.0101.00143.9 | 00.287.420.4.204.000 |

5

| NO | NAMA / NIP                                                     | OPD                                 | REKENING BANK      | NPWP                 |
|----|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 31 | SOVIA WELNI, A.Md<br>NIP. 19890825 202012 2 005                | KECAMATAN SULIKI                    | 0100.0101.00166.1  | 00.121.285.1.204.000 |
| 32 | DILA FATMA SUCITRA<br>NIP. 19840622 201001 2 004               | KECAMATAN GUGUAK                    | 0100.0101.00150.6  | 00.287.421.2.204.000 |
| 33 | MEGA EKA PUTRI, A.Md<br>NIP. 19921122 202012 2 004             | KECAMATAN MUNGKA                    | 0100.0101.00133.6  | 00.121.286.9.204.000 |
| 34 | TARMIS<br>NIP. 19720828 200906 1 002                           | KECAMATAN AKABILURU                 | 0100.0101.00152.1  | 00.121.287.7.204.000 |
| 35 | YURMA DEWI, S.A.P<br>NIP. 19751016 200701 2 012                | KECAMATAN PAYAKUMBUH                | 0100.0101.00139.7  | 00.287.608.4.204.000 |
| 36 | OKTAVIA FITRI LESTARI, A.Md.Akun<br>NIP. 19931003 202012 2 011 | KECAMATAN LUAK                      | 0100.0101.00153.0  | 00.121.288.5.204.000 |
| 37 | OSFITA<br>NIP. 19770425 200901 2 002                           | KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN        | 0100.0101.00136.0  | 00.121.289.3.204.000 |
| 38 | SYAFRIZAL<br>NIP. 19730913 201408 1 001                        | KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI      | 0100.0101.00142.7  | 00.287.609.2.204.000 |
| 39 | RIZA NOVRIYANTI, A.Md.T<br>NIP. 19911116 202012 2 009          | KECAMATAN HARAU                     | 0100.0101.00149.1  | 00.121.290.1.204.000 |
| 40 | ELVI MULIANA, A.Md<br>NIP. 19891210 202012 2 009               | KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU       | 1800.0101.00007.9  | 00.287.610.0.204.000 |
| 41 | JHONI YUNUS<br>NIP. 19690405 200906 1 008                      | KECAMATAN KAPUR IX                  | 0100.0101.00137.3  | 00.121.291.9.204.000 |
| 42 | ZOMI WAIZUL, SH<br>NIP. 19791101 200801 1 011                  | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   | 0100.0101.000.45.9 | 00.121.292.7.204.000 |
| 43 | RICO KHALILU RAHMAN<br>NIP. 19821231 200701 1 008              | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 0100.0101.00280.8  | 00.809.445.0.204.000 |

BUPATI LIMA PULUH KOTA

SAFNI

